



# LAPORAN

## KEGIATAN EVALUASI

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### TRIWULAN I ( Januari - Maret) Tahun 2023

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dengan melakukan kegiatan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, perbaikan dan peningkatan kualitas dari program-program pembangunan perlu terus menerus dilakukan. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tinjauan atau evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa difokuskan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui proses tender (*tendering*), akan tetapi secara bertahap juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang dilakukan dengan proses non tender sehingga semua kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru setiap tahunnya dapat dipantau mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan realisasinya.

Proses penginputan data pengadaan barang dan jasa dimulai dari input Rencana Umum Pengadaan (RUP) kedalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang merupakan portal

yang dimiliki oleh Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarbaru, setelah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengumumkan kemudian menyampaikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk kegiatan pekerjaan dilakukan dengan proses tender. Pada tahun 2017 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengembangkan sistem tender secara elektronik (silang on-line) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa, agar dalam proses permohonan tender yang diajukan oleh SKPD dapat di pantau sewaktu-waktu (*real time*) oleh pengguna jasa dan kelompok kerja pemilihan UKPBJ.

## Bagan 1.1

### Mekanisme Permohonan Tender



## B. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum maksud dan tujuan kegiatan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023 triwulan I adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan melalui metode tender/seleksi sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret), hasil evaluasi triwulan I dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan koordinasi antar bidang sektoral dan pada akhir tahun disusun laporan tahunan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023 pada triwulan I, indikasi tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, serta identifikasi

permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah direncanakan.

### C. PESERTA KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023 triwulan I merupakan salah satu kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam pelaksanaannya terlibat langsung adalah SKPD sebagai pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang akan di adakan dan para penyedia barang dan jasa serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang terdiri dari sekretariat dan kelompok kerja pemilihan (Pokja).

### D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2023 triwulan I dilaksanakan dan dilaporkan pada acara rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan tahun berkenaan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai supervisi pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

### E. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan kemudian tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut. Dalam pelaksanaannya, data- data tersebut diperoleh dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penginputan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh SKPD kedalam portal LPSE (SIRUP) pada awal tahun setelah DPA SKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Data yang di input adalah semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh SKPD pada tahun 2023 baik yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan *e-purchasing/e-catalog*. RUP paling sedikit berisikan informasi tentang paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi dan perkiraan biaya.
2. SKPD menyampaikan permohonan proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/seleksi kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas

200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultasi yang nilainya di atas 100 (seeratus) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui UKPBJ.

3. Bagian Pengadan Barang dan Jasa melakukan rekapitulasi pendataan terkait informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang dilaksanakan dengan metode tender/tender. Informasi tersebut berupa jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun 2023, total anggaran seluruh paket dan SKPD yang melaksanakan tender dan seleksi. Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan perkembangan (*progress*) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik pekerjaan yang belum dilaksanakan tender, pekerjaan dalam proses tender maupun pekerjaan yang telah selesai petenderan.

**BAB II****PROFIL PENGADAAN BARANG DAN JASA  
(UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA)****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Pada tahun 2006 Kota Banjarbaru merupakan satu dari sedikit daerah di Indonesia yang menerapkan penggunaan ULP atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses tendernya. Alasan utama pembentukan ULP oleh Pemerintah Kota Banjarbaru bukan hanya karena bentuk organisasi pengadaan ini disebutkan dalam Kepres nomor 80 tahun 2003, melainkan lebih kepada keterbatasan sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat pengadaan. Dengan pembentukan ULP, otomatis beban kerja panitia yang jumlahnya terbatas ini dapat dipantau, selain juga dengan fakta bahwa dengan adanya ULP, Pemkot Banjarbaru mengharapkan tercapainya citra *Good Governance*.

Salah satu elemen penting untuk mendorong suksesnya penerapan *good governance* adalah melakukan upaya pencegahan korupsi dalam sektor pengadaan barang/jasa. Sektor ini menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling besar dan juga akan memunculkan resiko kerugian negara yang besar pula akibat korupsi dan ketidakefisienan.

Resiko diatas dibuktikan dengan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sejak tahun 2001-2006. Kajian yang disebut *Country Procurement Assesment Report (CPAR)* ini menyebutkan telah terjadi kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada bulan Mei 2006, berdasarkan SK Walikota Banjarbaru nomor 113 dan 114 Tahun 2006, Kota Banjarbaru resmi menggunakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pusat penyelenggara pengadaan di lingkup kota Banjarbaru. Saat ini seluruh pengadaan barang, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang nilainya di atas 200 (dua ratus) juta rupiah serta pengadaan jasa konsultansi yang nilainya di atas 100 (seratus) juta rupiah wajib dilaksanakan melalui ULP.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) memiliki

tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Adapun fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan barang dan jasa;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pengadaan barang dan jasa;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
4. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa;
5. Pengendalian barang dan jasa;
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan barang dan jasa;
7. Pengkoordinasian teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
8. Penyusunan pertimbangan teknis terkait penyelesaian pengaduan masyarakat/sanggah/banding terhadap pengadaan barang dan jasa;
9. Pelaksanaan pelayanan konsultasi teknis pengadaan barang dan jasa terhadap SKPD penyedia barang dan jasa;
10. Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.1

Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)  
 Kota Banjarbaru



## B. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BERDASARKAN RENJA

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) 2023, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Sekdako Banjarbaru memiliki kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dengan indikator dan target kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

- a. **Output** (keluaran) : Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa dengan target 4 kali rapat koordinasi dan 4 laporan per triwulan.
- b. **Outcome** (Hasil) : Persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 100% (Jumlah permohonan SKPD yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa : jumlah SKPD yang dilaksanakan pengadaan barang/jasa x 100%)
- c. **Benefit** (manfaat) : Meningkatnya Pelayanan Publik dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat sangat baik.
- d. **Impact** (dampak) : Terwujudnya Pemerintahan Kota Banjarbaru efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN

**BAB III**

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TRIWULAN I**

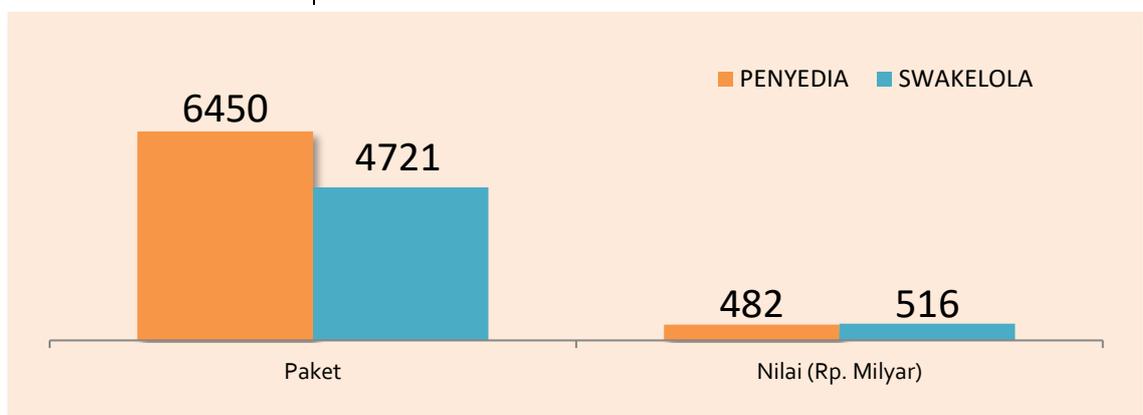
**A. RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)**

Sesuai Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengumuman Rencana Umum Pengadaan ini dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pengumuman RUP dapat dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2023, Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) adalah sebanyak 11.171 paket pengadaan dan total anggaran pengadaan sebesar Rp. 998.132.361.160,00. Dari jumlah tersebut sebanyak 6.450 paket atau 57,74 % dilaksanakan dengan melalui penyedia. Berikut adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP sampai dengan triwulan I tahun 2023.

**Grafik 3.1.**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan cara pelaksanaan yang telah diumumkan di SIRUP sampai dengan triwulan I tahun 2023.



Sumber : SIRUP per tanggal 31 maret 2023

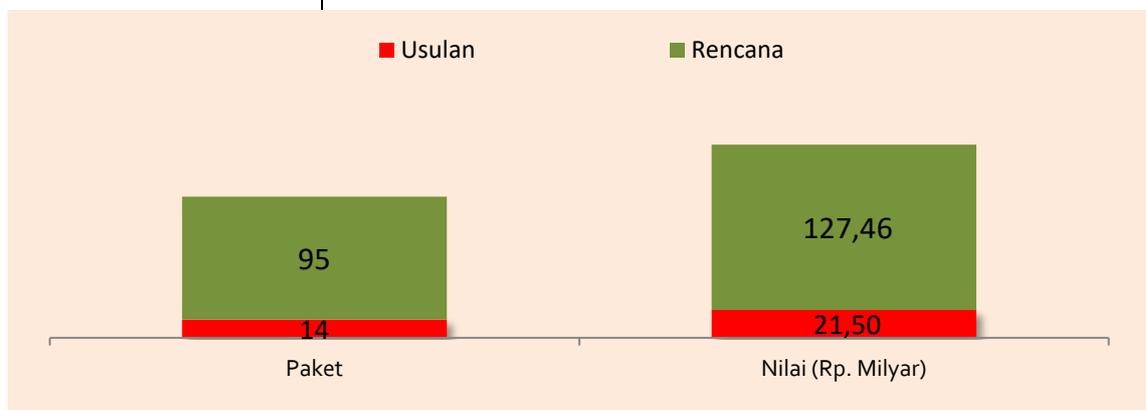
**B. USULAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENDER/SELEKSI TRIWULAN I**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru yang di fasilitasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dilakukan per triwulan dan dilakukan pengkinian data dan pelaporan setiap bulan terhadap permohonan yang mintakan oleh unit kerja (SKPD) untuk dilakukan proses tender (*e-tendering*), hal ini untuk mengetahui *progress* setiap bulan pengajuan paket tender oleh SKPD hingga selesai tender (kontrak). Bahan tersebut dijadikan sebagai bahan pimpinan dalam mengevaluasi dan mengendalikan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan jadwal kegiatan dan penggunaan anggaran.

Data sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret) Tahun 2023, usulan pengadaan yang disampaikan kepada unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk dilakukan proses tender/seleksi (*e-tendering*) sebanyak 14 paket dengan total nilai sebesar Rp. 21.504.473.330,00. Adapun perbandingan antara usulan pelaksanaan pengadaan terhadap rencana pelaksanaan pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP berdasarkan paket dapat terlihat pada grafik 3.2 dibawah ini.

**Grafik 3.2.**

Perbandingan Usulan Pengadaan Tender/seleksi terhadap Rencana Pelaksanaan Pengadaan Yang Telah di Umumkan Di Sirup.



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan I

Usulan pelaksanaan pengadaan Tender/seleksi sampai dengan triwulan I tahun 2023 berasal dari unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana terdiri dari 8 paket pekerjaan jasa konsultansi dan 5 paket pekerjaan jasa konstruksi, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah terdiri dari 1 paket pekerjaan jasa konsultansi.

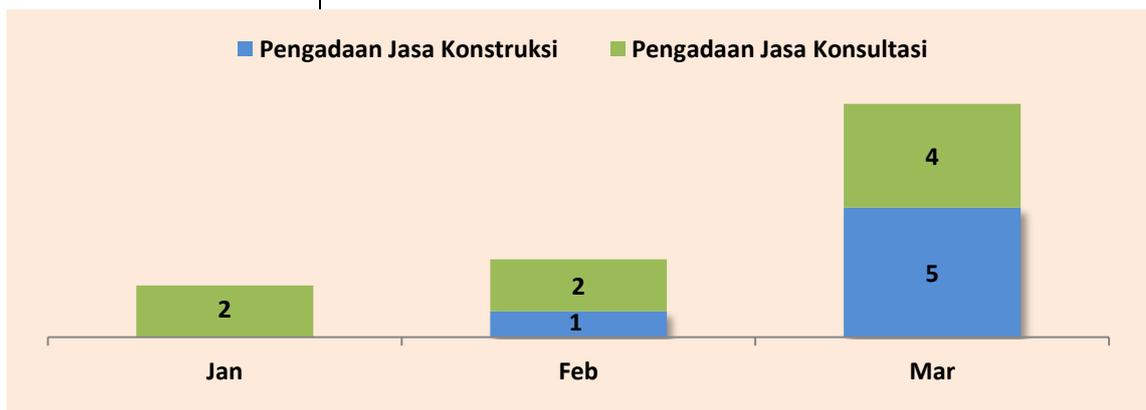
**Tabel 3.1.** Usulan paket tender/seleksi triwulan I 2023  
 Total 14 paket

Jumlah Paket	Jenis Pengadaan	Nilai Paket
9	Jasa Konsultansi	Rp 6.286.760.000,00
5	Jasa Konstruksi	Rp 15.217.713.330,00

Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan I Tahun 2023

Pengajuan permohonan pengadaan ke unit kerja kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimulai pada awal tahun setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditayangkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Adapun data pengajuan permohonan pengadaan oleh SKPD menurut jenis pengadaan dapat tergambar pada grafik di bawah.

**Grafik 3.2.** Perkembangan Pengajuan Permohonan Tender Pengadaan Jenis Pengadaan dengan rincian per Bulan Tahun 2023 (total 14 paket)



Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan I

Sebagaimana terlihat pada grafik diatas, pekerjaan yang disampaikan untuk dilakukan proses tender/seleksi pada triwulan I (Januari s.d Maret) dimulai pada bulan Januari sebanyak 2 paket pengadaan Jasa Konsultansi. Bulan Februari 1 pengadaan Jasa Konstruksi dan 2 pengadaan Jasa

Konsultansi, serta untuk bulan Maret sebanyak 5 pengadaan Jasa Konstruksi dan 4 pengadaan Jasa Konsultansi.

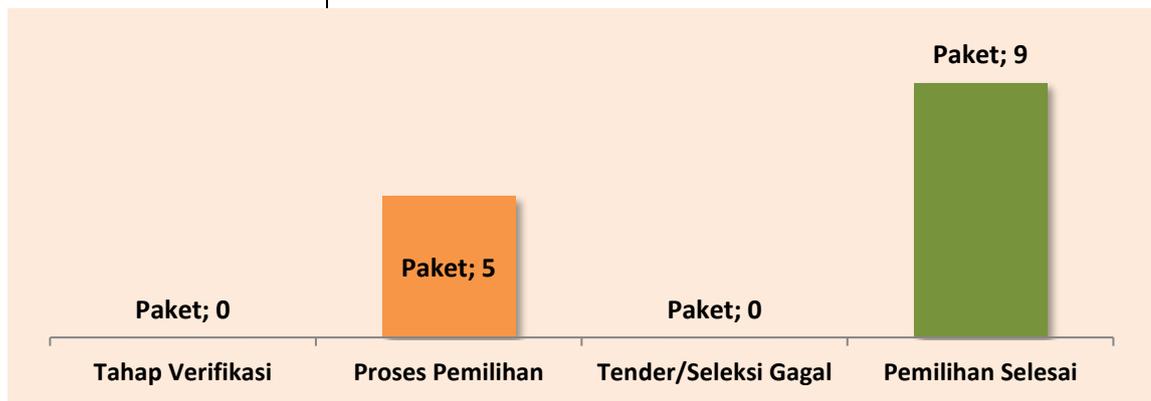
**C. REALISASI PELAKSANAAN PENGADAAN TRIWULAN I**

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru triwulan I tahun 2023 digambarkan dengan 2 (dua) indikator, yaitu : (1) Menggambarkan jumlah pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja kemudian dirinci berdasarkan tahapan proses pelaksanaan pengadaan seperti dalam tahap verifikasi, dalam tahap proses pemilihan, pelaksanaan pemilihan gagal dan pelaksanaan pemilihan selesai; (2) Membandingkan nilai paket pekerjaan sesuai HPS, Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak dan nilai efisiensi sisa anggaran.

Berdasarkan data yang di himpun sampai dengan triwulan I (Januari s.d Maret) tahun 2023 berikut rincian proses pengadaan:

**Grafik 3.3.**

Proses pengadaan dalam Tahap Verifikasi, Proses Pemilihan dan Pemilihan Selesai pada Triwulan I Tahun 2023 (Jumlah Paket)



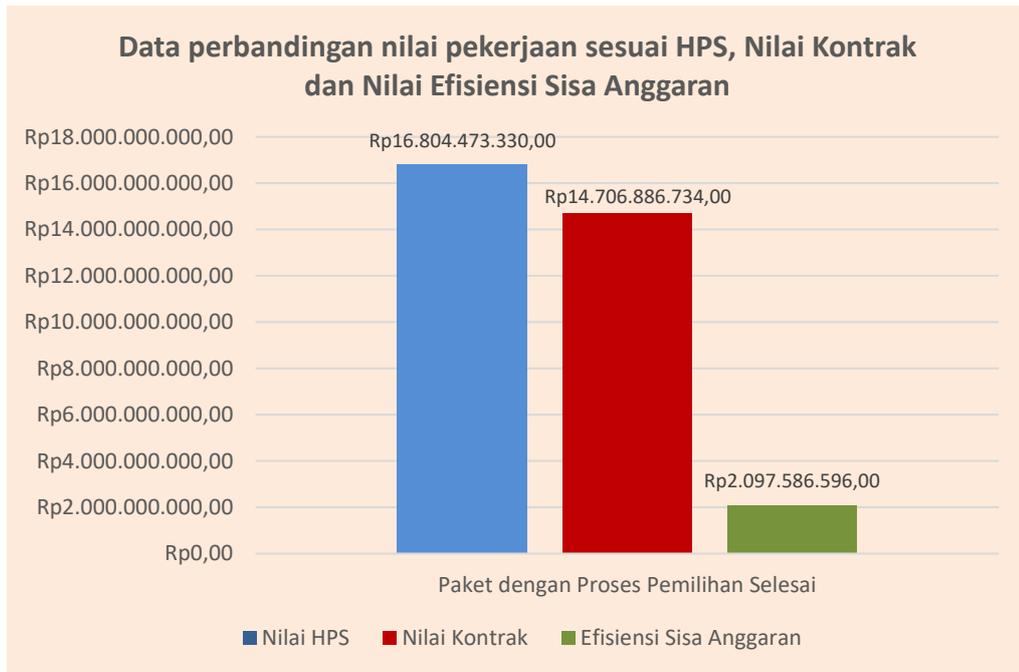
Sumber : Laporan Evaluasi dan Pelaporan Triwulan I

Berdasarkan grafik 3.3 diatas terlihat bahwa dari 14 paket pekerjaan yang diusulkan oleh unit kerja sampai dengan akhir bulan Maret 2022, proses pemilihan yang telah selesai dilaksanakan adalah sebanyak 9 paket pekerjaan. Pada 9 Paket Pekerjaan tersebut total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 16.801.274.600,00, namun total nilai kontrak sebesar Rp. 14.706.886.734,00 sehingga terdapat efisiensi sisa anggaran sebesar Rp. 2.094.387.866,00.

Berikut data perbandingan nilai paket pekerjaan yang proses pemilihannya selesai sesuai HPS, Nilai Kontrak dan Nilai Efisiensi Sisa Anggaran sebagaimana pada Grafik 3.4.

### Grafik 3.4.

Nilai Paket Pekerjaan Sesuai HPS, Nilai Pekerjaan Selesai/ kontrak dan Sisa Pekerjaan Tahun 2023 Triwulan I (Rp)



Sesuai Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa batas harga penawaran maksimal adalah 80% dari nilai harga yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sehingga dapat dikatakan bahwa dari sisa tender sebesar Rp. 2.094.387.866,00 atau 12,48% terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENUTUP

Demikian laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Triwulan I Tahun 2023 yang disusun berdasarkan data yang dihimpun dari bulan Januari hingga Maret. Pada penyusunan laporan triwulan berikutnya akan selalu dilakukan pengkinian data dan informasi maupun kedalaman analisa dari berbagai aspek.

Semoga laporan kegiatan evaluasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Banjarbaru triwulan I Tahun 2023 dapat memberikan manfaat khususnya Bagian Pengadaan barang dan Jasa dan secara umum untuk unit kerja dan para pengambil kebijakan untuk dijadikan *input* dalam penyusunan kebijakan pembangunan di periode berikutnya, sehingga program-kegiatan pembangunan di Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum pada dokumen perencanaan.

# EXECUTIVE REPORT ULP KOTA BANJARBARU 2023 (Triwulan I)

VERSI 2

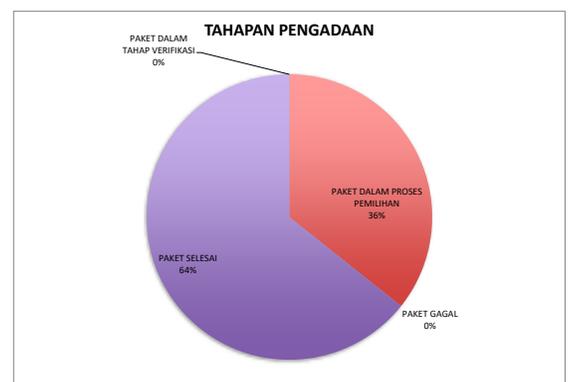
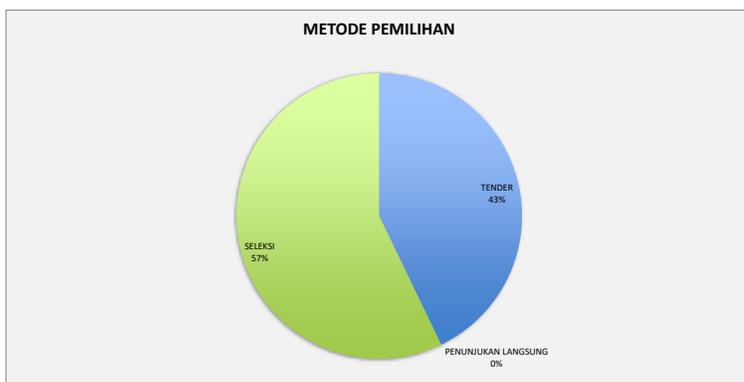
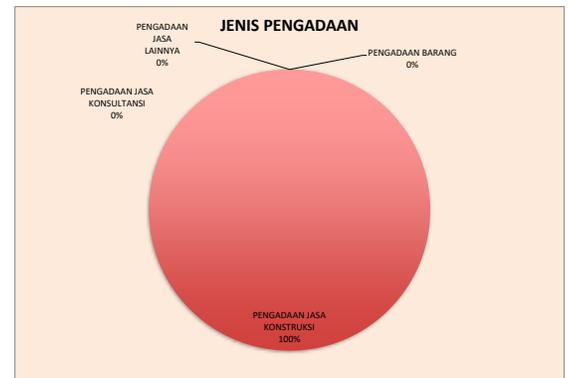
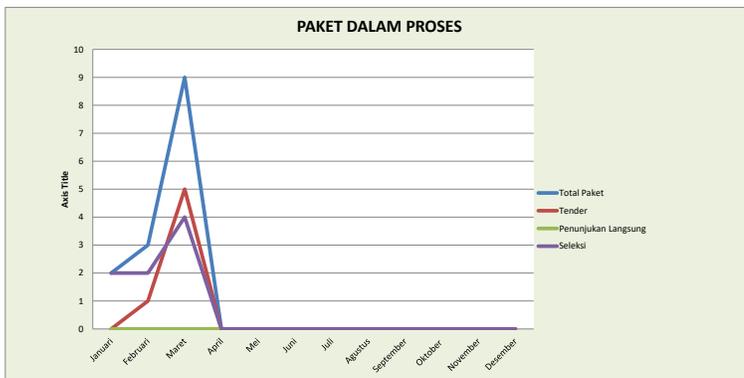
PAKET DITERIMA	:	14
PAKET DALAM TAHAP VERIFIKASI	:	0
PAKET DALAM PROSES PEMILIHAN	:	5
PAKET GAGAL	:	0
PAKET SELESAI	:	9
PENGADAAN BARANG	:	0
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	:	6
PENGADAAN JASA KONSULTANSI	:	0
PENGADAAN JASA LAINNYA	:	0
TENDER	:	6
PENUNJUKAN LANGSUNG	:	0
SELEKSI	:	8

## Kendala Yang Sering Memperlambat Proses Pengadaan

1. Kesalahan Penulisan Tujuan Surat
2. Belum Mengumumkan RUP/RUP Tidak Sesuai
3. Belum Menyampaikan RPP ke ULP
4. Lampiran Pengajuan Pengadaan Tidak Lengkap
5. Dokumen Pengadaan bukan ditandatangani oleh PPK
6. Terlambat menyerahkan softcopy kepada Pokja

SKPD SUDAH MENYAMPAIKAN RPP	:	32	
SKPD TIDAK MENYAMPAIKAN RPP	:	0	
TOTAL NILAI PENGADAAN SESUAI RPP	:	23.094.873.330,00	
TOTAL PAKET PENGADAAN SESUAI RPP	:	14	
TOTAL PAGU PAKET DITERIMA ULP	:	46.189.746.660,00	
TOTAL PAGU PAKET SELESAI DILELANG	:	16.804.473.330,00	
TOTAL NILAI KONTRAK YANG DIHASILKAN	:	14.706.886.734,00	
EFISIENSI HPS	:	2.097.586.596,00	12,48%

\*prosentase terhadap total RPP



## DATA PENGADAAN ULP KOTA BANJARBARU 2023 (Triwulan I)

No	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal Berkas Diterima	Kode Paket	Kode RUP	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Jenis Pemilihan	Status Proses	Nilai Pagu	Nilai HPS	Nama Pelaksana	Nilai Kontrak	Tanggal Mulai Proses	Tanggal Selesai Proses
1	31/01/2023	31/01/2023	3696023	38137749	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai	500.000.000,00	500.000.000,00	PT. SIGMA REKATAMA CONSULINDO	478.000.000,00	17/02/2023	29/03/2023
2	25/01/2023	25/01/2023	3697023	38137620	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembuatan AMDAL Pembangunan Stadion Olah Raga Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai	500.000.000,00	500.000.000,00	PT. KINARYA ALAM RAYA	489.850.000,00	01/03/2023	02/05/2023
3	16/02/2023	20/02/2023	3701023	38238636	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penyusunan Dokumen Masterplan dan Siteplan Pengembangan Kawasan Aero City pada Sub BWP 3 dan 5	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai	350.000.000,00	350.000.000,00	PT. KINARYA ALAM RAYA	341.500.000,00	06/03/2023	28/04/2023
4	27/02/2023	28/02/2023	3704023	38137775	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Gedung Serba Guna POLRES dan Rehabilitasi Ruang Kapolres Banjarbaru	Jasa Konstruksi	Tender	Selesai	5.812.380.000,00	5.811.000.000,00	CV Kindai Artha Jaya	5.663.004.482,55	10/03/2023	03/04/2023
5	21/02/2023	28/02/2023	3700023	38100056	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)	Jasa Konsultansi	Seleksi	Selesai	236.760.000,00	236.537.600,00	PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM	212.352.900,00	09/03/2023	18/04/2023
6	06/03/2023	09/03/2023	3703023	39364191	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masterplan Penanganan Banjir Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pemilihan	3.000.000.000,00	2.999.955.930,00				
7	08/03/2023	09/03/2023	3702023	38238572	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Embung Gunung Kupang (Paket 5)	Jasa Konstruksi	Tender	Selesai	4.613.101.330,00	4.613.000.000,00	CV.ARDY GEMABAHANA	3.690.389.751,45	21/03/2023	26/04/2023
8	15/03/2023	20/03/2023	3714023	38137367	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Banjarbary	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pemilihan	400.000.000,00	400.000.000,00				
9	15/03/2023	20/03/2023	3724023	38137593	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pemilihan	400.000.000,00	400.000.000,00				
10	15/03/2023	20/03/2023	3713023	38137376	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Jasa Konsultansi	Seleksi	Proses Pemilihan	400.000.000,00	400.000.000,00				
11	13/03/2023	21/03/2023	3710023	39358649	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sungai Guntung Paikat	Jasa Konstruksi	Tender	Selesai	1.987.300.000,00	1.987.080.000,00	AKBAR BINTANG PERKASA	1.589.664.000,00	05/04/2023	10/05/2023
12	13/03/2023	21/03/2023	3709023	39359149	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sungai Karet	Jasa Konstruksi	Tender	Selesai	2.004.334.000,00	2.004.334.000,00	CV. PRATAMA TUNGGAL	1.602.667.200,00	05/04/2023	10/05/2023
13	13/03/2023	21/03/2023	3708023	39363931	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Sungai Kuranji	Jasa Konstruksi	Tender	Selesai	800.598.000,00	799.323.000,00	CV.HALIM JAYA	639.458.400,00	05/04/2023	10/05/2023
14	30/03/2023	31/03/2023	3717023	42556808	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Jaringan Irigasi Sei. Tempurau DI. Bangkal	Jasa Konstruksi	Tender	Proses Pemilihan	2.090.400.000,00	2.078.817.536,53				

## REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SKPD

NAMA SKPD	DATA PENGADAAN PADA RPP		PAKET DISERAHKAN KE ULP				PAKET PENGADAAN YANG DILELANG						EFISIENSI		SUMMARY PROSES PENGADAAN						
			JUMLAH		NILAI PAGU		JUMLAH		PAKET LELANG SELESAI		NILAI KONTRAK				BERDASARKAN JENIS PENGADAAN			BERDASARKAN METODE PEMILIHAN			
	PAKET	NILAI	PAKET	(%)	(Rp)	(%)	PAKET	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	Sisa Anggaran	(%)	BARANG	JASA KONSTRUKSI	JASA KONSULTANSI	JASA LAINNYA	LELANG	SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13	22.744.873.330	13	100%	22.744.873.330	100%	8	62%	16.454.473.330	72%	14.365.386.734	63%	8.379.486.596	37%	0	6	7	0	6	7	0
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	350.000.000	1	100%	350.000.000	100%	1	100%	350.000.000	100%	341.500.000	98%	8.500.000	2%	0	0	1	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>23.094.873.330</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>23.094.873.330</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>64%</b>	<b>16.804.473.330</b>		<b>14.706.886.734</b>	<b>64%</b>	<b>8.387.986.596</b>	<b>36%</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>